

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Efik Yusdiansyah, et.al., *Keterampilan dan Kemahiran Hukum Tata Negara*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2012.
- Hamid Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta, 2013.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Makkatutu, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.
- Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 2*, Kanisius, Jakarta, 2013.
- Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Pamudji Atmosudirdjo, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara: Jakarta, 1985.
- Philipus M Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Poerwasunata, W.J.S, *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Rosyid Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Setara Press, Malang, 2015.

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT.Ichtiar Baru,Jakarta,1985

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan..

UU No Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### **Sumber Lainnya**

Pikiran Rakyat, Senin 18 Mei 2015 , *Ade Irawan Masih Bupati Sumedang*.

Sumedang Ekspres, Senin 20 November 2015, *Ade Akui Salah Tunjuk Wabup*.

Tribun JABAR, Senin 20 November 2015, *Ade Mengaku Bersalah Menunjuk Eka.*

Tribun JABAR, Rabu 2 Desember 2015, *Eka Harus Serius Hadapi Tudingan Ade.Hadapi Tudingan Ade,*

